



PERAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DALAM MENJALANKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA UNTUK MENGURANGI PERTUMBUHAN PENDUDUK

Mutohharul Janani¹, Hamzah², Khusna Ikhwanil Arifin³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

²Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

³Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail: 221380027.mutohharul@uinbanten.ac.id¹, 221380016.hamzah@uinbanten.ac.id², 221380018.khusna@uinbanten.ac.id³.

ABSTRACT

Rapid population growth is a big challenge for the Banten Provincial Government in ensuring the welfare of its people. The Family Planning (KB) program is part of efforts to control population growth. The Family Planning Program has several benefits, including maintaining the health of mothers and babies, promoting good parenting patterns and adequate breast milk intake for children, preventing unwanted pregnancies, protecting people from sexually transmitted diseases, and forming high-quality families. The Banten Provincial Government plays an important role in implementing family planning programs through policy and planning preparation, education and outreach, provision of health facilities and services, training and capacity building, as well as monitoring and evaluation. This research uses qualitative methods with the type of library research to analyze the role of the Banten Provincial government in the family planning program. The research results show that the family planning program has had a significant impact in reducing population growth rates, reducing birth rates, reducing maternal and infant mortality rates, and improving the quality of life of the population. The conclusion of this research is that the active role and ongoing support of the Banten Provincial government is very important in the success of the family planning program to reduce population growth.

KEYWORD:

Family Planning Program, Population Growth, Banten Provincial Government.

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk yang pesat menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Program Keluarga Berencana (KB) merupakan bagian dari upaya pengendalian pertumbuhan penduduk. Program Keluarga berencana memiliki beberapa manfaat, antara lain menjaga kesehatan ibu dan bayi, mempromosikan pola asuh yang baik dan asupan ASI yang cukup bagi anak, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, melindungi orang dari penyakit menular seksual, serta membentuk keluarga yang berkualitas tinggi. Pemerintah Provinsi Banten berperan penting dalam melaksanakan program keluarga berencana melalui penyusunan kebijakan dan perencanaan, edukasi dan sosialisasi, penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta monitoring dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) untuk menganalisis peran pemerintah Provinsi Banten dalam program keluarga berencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keluarga berencana memberikan dampak signifikan dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk, penurunan angka kelahiran, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan kualitas hidup penduduk. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran aktif dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah Provinsi Banten sangat penting dalam keberhasilan program KB untuk mengurangi pertumbuhan penduduk.

KATA KUNCI

Program Keluarga Berencana, Pertumbuhan Penduduk, Pemerintah Provinsi Banten.

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 5 Juni 2024
Direvisi: 15 Juni 2024
Disetujui: 22 Juni 2024

CORRESPONDING AUTHOR

Name: Mutohharul Janani
Affiliation: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin
City: Banten
Email: 221380027.mutohharul@uinbanten.ac.id

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting suatu negara. Ekonomi klasik yang digagas Adam Smith bahkan menganggap populasi sebagai input potensial yang dapat dijadikan faktor produksi untuk meningkatkan output suatu bisnis keluarga. Semakin banyak orang yang kita miliki, semakin banyak tenaga kerja yang dapat kita pekerjakan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka banyak hal yang perlu direncanakan untuk mengatasi pertumbuhan penduduk tersebut. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat menimbulkan banyak permasalahan. Namun bukan berarti di masa lalu tidak ada masalah kependudukan. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dunia, Indonesia juga merupakan negara berkembang yang tidak dapat lepas dari pesatnya pertumbuhan penduduk (SD et al., 2014).

Ledakan penduduk akan menimbulkan masalah baru dan dapat mengakibatkan bencana alam karena kegiatan pola hidup dan pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan lingkungan. Ledakan penduduk juga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup karena banyaknya kebutuhan keberlangsungan hidup, seperti bertambahnya bangunan untuk tempat tinggal, penebangan kayu liar untuk peralatan rumah tangga, pembakaran kayu liar, dan pembakaran kayu liar lainnya (Adim, 2015).

Kelahiran adalah proses regenerasi keturunan yang diinginkan oleh semua masyarakat, dan di Indonesia, setiap orang yang telah beranjak dewasa akan menikah dan membentuk keluarga sendiri, bahkan dianggap sedikit aneh ketika seseorang yang telah beranjak dewasa tidak segera menikah. Tingkat perkawinan yang tinggi dan indeks natalitas yang tinggi akan disebabkan oleh hal ini (Adim, 2015).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi di beberapa provinsi di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, yang saat ini menjadi permasalahan yang cukup mendasar di Indonesia. Apabila tidak ada intervensi dari pemerintah dalam meningkatkan program Keluarga Berencana jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi ini dapat berdampak kepada bidang sosial, politik, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Tingkat pertumbuhan yang tinggi disebabkan oleh masih tingginya tingkat kelahiran dan cepatnya tingkat kematian. Selain itu jumlah pertumbuhan yang tinggi di sebabkan oleh struktur umur penduduk yang tidak seimbang karena sebagian besar penduduk di Indonesia masih berusia muda. Oleh karena itu salah satu kebijakan kependudukan pemerintah di Indonesia dan telah menunjukkan bukti keberhasilan yaitu kebijakan kependudukan melalui program Keluarga Berencana (KB) (Muaya et al., 2023).

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui memperpanjang usia perkawinan, mengatur kelahiran, meningkatkan ketahanan keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tujuan dari KB adalah untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Keluarga Berencana (KB), menurut Hanafi Hartanto, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau upaya manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga, tanpa melanggar hukum agama, undang-undang negara, atau moral Pancasila, demi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan dan bangsa secara keseluruhan (Soleha, 2016).

Pertumbuhan penduduk yang cepat merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh Indonesia khususnya di Provinsi Banten. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Banten memiliki peran penting dalam menjalankan program Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya untuk mengurangi pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 jumlah penduduk di Provinsi Banten sebanyak 12.167,04 Jiwa. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah penduduk di Provinsi Banten sebanyak 12.307,73 Jiwa. Sementara itu pada tahun 2024 jumlah penduduk di Provinsi Banten sebanyak 12.431,39 Jiwa (Statistik, 2024a). Berdasarkan data dari BPS tersebut dari tahun 2022-2024 jumlah penduduk Provinsi Banten mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Banten harus memperkuat atau memperdalam untuk menjalankan program KB supaya mereda pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten.

Berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri pada semester II tahun 2020, penduduk Banten berjumlah 11.637.637 jiwa. Sementara pada laporan semester I tahun 2023 penduduk Banten meningkat menjadi 12.381.098 jiwa. Kepala Dinas Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Sitti Ma'ani Nina mengatakan, sejak 2020 sampai 2021, penduduk Banten bertambah 3,38 persen. "Sedangkan pada semester II tahun 2022 bertambah 2,42 persen," ujarnya, Kamis (9/11).

Ia menyatakan bahwa kependudukan merupakan salah satu masalah penting yang masih dibahas oleh banyak orang. Berbagai aspek kehidupan manusia akan dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk di suatu tempat. Peningkatan kualitas manusia bersama dengan pertumbuhan penduduk secara kuantitas dapat menimbulkan tantangan dan masalah baru bagi pembangunan. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menghalangi upaya untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan. Dia menyatakan bahwa masalah kependudukan akan menyebabkan beban ketergantungan yang tinggi, atau rasio ketergantungan. Angkatan kerja yang produktif harus memelihara beban atau tanggungan yang besar dari penduduk berusia lanjut dan anak-anak. Jika rasio ketergantungan terus meningkat, hal itu akan berdampak buruk pada populasi (Rosintah, 2023).

Umur perkawinan pertama adalah umur ketika seorang perempuan menikah secara hukum dan biologi, yang berarti dimulainya masa pembuahan, dan merupakan bagian dari dasar kebijakan yang digunakan untuk menghentikan laju pertumbuhan penduduk. Dengan demikian kami bertujuan untuk menjelaskan pengertian program KB, manfaat program KB, peran pemerintah Provinsi Banten dalam menjalankan program KB untuk mengurangi pertumbuhan penduduk, dan dampak program KB terhadap pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten.

METODE

Metode yang digunakan untuk menulis jural ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research), dengan mengkaji kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan mencari materi dari makalah, web site, buku dan jurnal yang layak dijadikan referensi. Seperti yang dikemukakan oleh Miqzaqon T dan Purwoko bahwa penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya (M. Sari & Asmendri, 2020). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan data sekunder yakni dengan mengumpulkan data secara tidak langsung dengan meneliti objek yang bersangkutan. Setelah mengumpulkan beberapa jurnal dan buku terkait dengan materi pembahasan selanjutnya menganalisis materi melalui studi pustaka dengan hasil dari analisis berupa deskriptif (Assyakurrohim et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Program Kb

Setiap orang berhak menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan, dengan menjunjung nilai-nilai luhur yang tidak melanggar harkat dan martabat manusia menurut standar agama. Hak reproduksi individu, sebagai bagian dari pengakuan hak asasi manusia yang diakui secara internasional, dapat berarti setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, etnis, usia pekerjaan, agama, semuanya mempunyai hak yang sama untuk mengambil keputusan secara bebas dan bertanggung jawab. diri, keluarga dan masyarakat tentang jumlah anak, jarak antar anak serta penentuan kapan dan dimana anak tersebut akan dilahirkan. Dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga secara eksplisit menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi. Bagian dari layanan Keluarga Berencana adalah layanan kontrasepsi. Keluarga berencana adalah upaya untuk mengontrol kelahiran anak, jarak dan usia yang ideal untuk melahirkan, dan kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan yang sesuai dengan hak reproduksi untuk membangun keluarga yang baik. Pengaturan kehamilan berarti membantu pasangan suami istri melahirkan anak pada usia yang tepat dengan suntik, pil, kondom, tubektomi dan vasektomi, dan konseling Metode Amenore Laktasi (MAL) (Cessaria, 2023).

Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia kedua, Jenderal Soeharto, program Keluarga Berencana di Indonesia dimulai pada tanggal 23 Desember 1957. Organisasi pertamanya dibentuk sebagai Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada 23 Desember 1957 dan bertujuan untuk mendukung kesejahteraan keluarga melalui tiga tujuan: mengontrol waktu kehamilan, pencegahan kemandulan, dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan demikian maka sejak tahun 1967 PKBI diakui sebagai badan hukum yang dapat menjalankan program yang berhubungan dengan tiga hal sebagaimana disebutkan di atas (Madi et al., 2023).

Keluarga Berencana (KB) dalam pengertian sederhana adalah merujuk kepada penggunaan metode kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama, untuk mengatur kesuburan dengan tujuan untuk

menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, dan ekonomi, dan untuk memungkinkan mereka memikul tanggungjawab terhadap anaknya dan masyarakat. Ini meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) menjarangkan anak untuk memungkinkan penyusuan dan penjagaan kesehatan ibu dan anak; (2) pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman; (3) mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keperluan keluarga, melainkan juga untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan, dan pemeliharaan anak (Rohim, 2016).

Keluarga berencana (KB) adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga dengan mengurangi jumlah bayi yang dilahirkan. Ini berarti merencanakan jumlah keluarga dengan menggunakan metode pencegahan kehamilan seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Jumlah ideal anak dalam keluarga adalah dua. Namun, Menurut Komite Ahli WHO (Expert Committee, 1970), KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri mencapai tujuan tertentu, seperti mencegah kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat kehamilan dalam hubungannya dengan umur suami istri, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga (Hartanto, 2004).

Oleh karena itu, keluarga berencana (KB) adalah upaya untuk mengurangi atau merencanakan jumlah kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi untuk membantu keluarga menjadi lebih kecil, bahagia, dan sejahtera. Pada akhir 1970-an, gerakan ini mulai dicanangkan. Secara umum, Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera), yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Secara khusus, Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan jumlah penduduk yang menggunakan alat kontrasepsi, menurunkan angka kelahiran bayi, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (Nurdianti, 2014).

Keluarga berencana merupakan upaya untuk mengukur jumlah dan jarak kelahiran anak yang diinginkan. Untuk mencapai hal tersebut, telah diciptakan beberapa metode atau cara untuk mencegah atau menunda kehamilan. Metode tersebut antara lain kontrasepsi atau pengendalian kelahiran dan keluarga berencana. Akseptor adalah peserta KB dan pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu metode atau alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, baik melalui program maupun non-program. Pasangan melakukan proses yang dikenal sebagai "akseptor" untuk menentukan jumlah anak, jarak, dan tanggal kelahiran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peneliti yang akseptor adalah pasangan usia subur yang salah satu dari mereka menggunakan metode atau alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, memutuskan jumlah dan jarak anak yang akan dilahirkan, dan menentukan waktu kelahiran (Zakaria & Meidawati, 2019).

Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa Program Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mengatur dan mengontrol jumlah anak yang diinginkan oleh pasangan suami istri atau individu. Program ini bertujuan membantu pasangan merencanakan keluarga sesuai dengan kondisi ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan mereka. Melalui KB, pasangan dapat menentukan jumlah anak yang diinginkan, jarak antar kelahiran, serta metode kontrasepsi yang paling cocok dengan kondisi dan preferensi mereka. Selain itu, KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, dan menurunkan angka kematian ibu dan anak akibat kehamilan yang tidak direncanakan.

B. Manfaat Program Keluarga Berencana (KB)

Salah satu bagian dari pembangunan nasional adalah program KB yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, spiritual, dan sosial budaya Indonesia secara seimbang dengan kemampuan produksi negara. Masyarakat internasional menganggap gerakan KB, yang dikampanyekan sejak tahun 1971, sebagai upaya yang berhasil untuk mengurangi jumlah kelahiran. Alat kontrasepsi seperti kondom, spiral, intrauterin device, dan sebagainya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah kelahiran (Romadhona, 2019). Selain untuk mengurangi jumlah kelahiran, program keluarga berencana (KB) juga memiliki banyak sekali manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Menjaga Kesehatan Ibu Dan Bayi

Program kehamilan yang direncanakan dengan baik akan berdampak positif pada kesehatan ibu dan bayi. Program keluarga berencana (KB) juga mengajarkan cara menjaga kesehatan ibu dan bayi, baik sebelum maupun setelah melahirkan.

2. Mempromosikan Pola Asuh yang Baik Dan Asupan ASI yang Cukup Bagi Anak

Pasangan dapat merencanakan kehamilan mereka dengan program KB. Hal ini erat kaitannya dengan pola asuh anak dan kecukupan ASI. Jarak yang ideal antara anak pertama dan kedua adalah antara 3 dan 5 tahun. Selama periode ini, anak pertama dapat menikmati ASI sepenuhnya hingga usianya 2 tahun. Selain itu, anak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya, yang akan berdampak positif pada tumbuh kembangnya.

3. Mencegah Kehamilan yang Tidak diinginkan

Pasangan yang tidak menggunakan program pencegahan kehamilan berisiko hamil. Misalnya, perempuan yang melakukan hubungan intim tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan di atas 35 tahun dan belum menopause memiliki kemungkinan hamil. Kehamilan ini, bagaimanapun, sangat berisiko dan dapat fatal bagi ibu dan bayi. Begitu juga dengan kehamilan setelah melahirkan terlalu dini. Misalnya, seorang ibu bisa melahirkan anak pertamanya ketika anak itu belum berusia satu tahun. Pada situasi seperti ini, ibu mungkin belum pulih sepenuhnya setelah melahirkan anak sebelumnya; ini pasti berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka.

4. Melindungi Orang Dari Penyakit Menular Seksual

Hubungan seksual, meskipun dilakukan antara pasangan suami-istri, tidak menghilangkan risiko penularan penyakit menular seksual seperti sifilis, gonore, dan HIV/AIDS. Namun, penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom dapat mencegah hal ini.

5. Mencegah Kematian Ibu dan Bayi

Menurunkan risiko kematian ibu dan bayi juga merupakan keuntungan dari program keluarga berencana. Kasus ini masih sering terjadi di masyarakat, terutama pada kehamilan yang berisiko tinggi, seperti wanita berusia lebih dari 35 tahun, wanita dengan penyakit jangka panjang, dan ibu baru.

6. Membentuk Keluarga yang Berkualitas Tinggi

Semua yang direncanakan dengan baik juga dapat menghasilkan hasil yang baik. Dalam kasus ini, merencanakan kehamilan dan jumlah anak bukan hanya masalah waktu; itu juga terkait dengan ekonomi, pendidikan anak, dan pola asuh. Dengan perencanaan yang tepat, kemungkinan memiliki keluarga yang baik akan meningkat. Tujuan dan manfaat program keluarga di atas menunjukkan bahwa program KB tidak bermaksud untuk menolak anak; sebaliknya, program KB bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia. Oleh karena itu, kita harus berpartisipasi dalam program keluarga berencana. Konsultasikan dengan dokter di puskesmas terdekat Anda dan pasangan untuk mendapatkan manfaat dari program keluarga berencana. Dokter akan menjelaskan berbagai macam metode kontrasepsi dan merekomendasikan yang terbaik untuk Anda dan pasangan Anda (Bella, 2022).

C. Peran Pemerintah Provinsi Banten dalam Menjalankan Program KB Untuk Mengurangi Pertumbuhan Penduduk.

Faktor utama yang menyebabkan penambahan penduduk adalah angka kelahiran yang tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, Program Kampung Keluarga Berencana KB diluncurkan untuk wilayah Kota Serang. Ini sesuai dengan amanat yang diberikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016 kepada BKKBN untuk merancang kegiatan dan program yang akan membantu mencapai sasaran pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015–2019 (Kemenkominfo, 2016). Untuk melanjutkan penancangan Kampung Keluarga Berencana oleh Presiden Republik Indonesia, dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/70/SJ. Setelah menerima surat edaran ini, Walikota Serang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Serang Nomor 476/Kep.223-Huk/2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Lokasi Kelurahan Binaan untuk Pelaksanaan Program Terpadu Kependudukan dan Kampung Keluarga Berencana Kota Serang (Rohayati et al., 2021).

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kependudukan adalah keluarga berencana. Tahun 2015, visi program keluarga berencana nasional telah diubah untuk mencapai standar keluarga yang

baik. Keluarga yang baik adalah yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan, dan bertanggung jawab. Program Nasional untuk Keluarga Berencana merupakan salah satu program dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu pokok dalam program Keluarga Berencana Nasional adalah menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Cara yang digunakan untuk mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera yaitu mengatur jarak kelahiran anak dengan menggunakan alat kontrasepsi (Admin Daldukkbppta, 2015).

Kurangnya peran pemerintah dalam mendorong program keluarga berencana akan menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cepat, meningkatkan kebutuhan akan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja yang memadai, serta akan menyebabkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Cara memilih alat kontrasepsi yang baik adalah ibu harus mempelajari terlebih dahulu metode KB berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat. Oleh karena itu, dalam menentukan metode kontrasepsi, perhatian harus diberikan pada penggunaan kontrasepsi yang wajar, efektif, dan efisien (Admin Daldukkbppta, 2015).

Salah satu upaya penting untuk mengontrol pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah Program Keluarga Berencana (KB). Melalui berbagai inisiatif dan kebijakan, pemerintah provinsi Banten memainkan peran strategis dalam pelaksanaan program ini. Pemerintah provinsi Banten menjalankan beberapa program KB, antara lain:

1. Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Program Keluarga Berencana (KB).

Sesuai dengan kebijakan nasional, pemerintah provinsi Banten bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan perencanaan program KB. Di tingkat provinsi, misalnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dapat membangun dan menerapkan kebijakan dan program lokal melalui penetapan target capaian, alokasi anggaran, dan strategi pelaksanaan yang efektif (Ningsih & Ardila, 2020).

2. Edukasi dan Sosialisasi.

Pemerintah provinsi Banten bertanggung jawab untuk memberi tahu masyarakat tentang pentingnya program KB. Ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti seminar dan penyuluhan di desa-desa, serta dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi mereka dalam program KB (A. I. Sari & Priyanto, 2019).

3. Penyediaan Fasilitas dan Layanan Kesehatan.

Pemerintah provinsi Banten juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan yang mendukung pelaksanaan program KB, seperti penyediaan alat kontrasepsi, layanan konsultasi keluarga berencana, dan pelatihan tenaga kesehatan. Puskesmas dan klinik KB berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dan layanan KB.

4. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas.

Peran penting lainnya dari pemerintah provinsi Banten adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan dan petugas lapangan KB. Pelatihan ini memastikan bahwa petugas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memberikan layanan KB yang berkualitas tinggi kepada masyarakat.

5. Monitoring dan Evaluasi.

Untuk memastikan bahwa program KB berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan, pemerintah provinsi Banten juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program KB di wilayahnya. Monitoring dan evaluasi juga penting untuk mengidentifikasi masalah dan hambatan yang dihadapi, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan (Hendayani & Putra, 2022).

Keluarga berencana memungkinkan pasangan untuk menunda kelahiran anak pertama mereka (penundaan), memisahkan anak-anak mereka (jarak), atau memutuskan berapa banyak anak yang mereka inginkan berdasarkan keamanan medis dan kemungkinan untuk kembali. Masa kehamilan. Pendidikan kesehatan merupakan aspek penting dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Karena pendidikan kesehatan tidak hanya membantu klien memilih dan memutuskan jenis

alat kontrasepsi yang ingin digunakan sesuai pilihannya, tetapi juga memungkinkan klien untuk menggunakan alat kontrasepsi dalam jangka waktu yang lebih lama. Klien yang lebih bahagia dan pada akhirnya lebih puas akan meningkatkan tingkat keberhasilan program keluarga berencana. Pendidikan kesehatan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengajarkan keterampilan dan rasa percaya diri untuk membantu meningkatkan Kesehatan (Admin Daldukkbpppa, 2015).

Media merupakan sarana penyampaian informasi. Contoh mediana adalah flipchart yang sering juga disebut dengan flipchart. Merupakan kumpulan ringkasan, diagram, gambar dan tabel yang dibuka satu per satu berdasarkan topik materi pembelajaran dan cocok untuk dipelajari dalam kelompok kecil (yaitu 30 orang). Selain itu diagram ini dapat merangkum poin-poin penting suatu presentasi dan menyampaikan pesan atau kesan tertentu, namun juga dapat mempengaruhi dan memotivasi perilaku masyarakat. Instansi pemerintah yang menyelenggarakan program keluarga berencana adalah BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). Badan ini mempunyai tugas melaksanakan tugas negara di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, BKKBN menyelenggarakan 6 fungsi:

1. Pembentukan kebijakan nasional untuk pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2. Pembentukan standar, norma, prosedur, dan kriteria untuk pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
3. Memberikan dukungan dan koordinasi untuk pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
4. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan pendidikan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
5. Melakukan pengawasan dan penilaian dalam pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
6. Memberikan pelatihan, bimbingan, dan dukungan dalam pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana (Admin Daldukkbpppa, 2015).

Di bawah tanggung jawabnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang menangani masalah kesehatan dan kesejahteraan anak. Menurut Pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017, Tugas Pokok dan Fungsi Kewajiban non-pelayanan dasar di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan program keluarga berencana diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas, DP3AKB menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

1. Pembentukan kebijakan teknis untuk melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, advokasi penggerakan dan informasi, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
2. Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, advokasi penggerakan dan informasi, dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, advokasi keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga.
4. Menjalankan administrasi dinas yang sesuai dengan bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, advokasi gerakan dan informasi, dan keluarga berencana. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
5. Manajemen UPT; dan pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya (Peraturan Walikota Serang Nomor 14 tahun 2017) (Rohayati et al., 2021).

Untuk tahun 2013, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah bekerja sama dengan mitra kerja dan stakeholders. Ada 68 mitra kerja yang dapat membantu program BKKBN. Untuk memastikan bahwa program Kependudukan dan Keluarga Berencana berjalan sesuai rencana, kerjasama ini bertujuan untuk mengatasi kendala dan masalah yang muncul selama proses pengelolaan program. Membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi untuk mengendalikan

jumlah penduduk, tingginya angka kelahiran, dan rendahnya pemakaian alat kontrasepsi adalah program andalan yang berkaitan dengan kependudukan dan keluarga berencana (Handayani, 2014).

D. Dampak Program KB Terhadap Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten

Salah satu bentuk intervensi jumlah penduduk yang dilahirkan melalui kebijakan kependudukan adalah penundaan, pembatasan, dan penjarangan kelahiran melalui penggunaan kontrasepsi pada program KB, yang bertujuan untuk mencapai tujuan menurunkan angka kelahiran, meningkatkan penggunaan kontrasepsi, mendewasakan usia perkawinan melalui sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dan meningkatkan kesehatan (Falimatuzahroh et al., 2023).

Untuk menjaga lingkungan dan mengendalikan lonjakan pertumbuhan yang tak terkendali, program dan kebijakan Kementerian Keuangan ini bermanfaat. Karena program KB bertujuan untuk membatasi laju pertumbuhan, masyarakat disarankan untuk mengikutinya. Dengan meningkatkan tingkat ekonomi dan pendidikan, mengikuti program KB dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Di provinsi Banten, dampak dari adanya program keluarga berencana (KB) dalam menghentikan pertumbuhan populasi penduduk di Provinsi Banten dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk

Program keluarga berencana (KB) telah berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk di provinsi Banten. Hasil dari data BPS Provinsi Banten (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa pada tahun 2011, laju pertumbuhan penduduk di provinsi tersebut mencapai angka 3,79%, tetapi pada tahun 2022, angka laju pertumbuhan penduduk Provinsi Banten menurun menjadi 1,66%. Ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa program keluarga berencana (KB) telah berhasil menghentikan atau mengurangi laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten (Statistik, 2024).

2. Penurunan Angka Kelahiran

Menurut Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2018, angka kelahiran total di wilayah Provinsi Banten sebesar 2,3, yang merupakan penurunan signifikan dibandingkan dengan angka kelahiran tahun sebelumnya. Program keluarga berencana juga memberikan kontribusi pada penurunan angka kelahiran di provinsi Banten (Kementrian Kesehatan RI, 2018).

3. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Kesehatan reproduksi ibu dan bayi juga diprioritaskan dalam program keluarga berencana. Dengan adanya sumber daya kesehatan dan informasi yang cukup, angka kematian ibu dan bayi di provinsi Banten dapat ditekan. Angka kematian ibu di provinsi Banten sebesar 95 per 100 ribu kelahiran hidup, dan angka kematian bayi sebesar 15,3 per 1.000 kelahiran hidup, menurut data Riskesdas tahun 2018 (Kementrian Kesehatan RI, 2018).

4. Peningkatan Kualitas Hidup Penduduk

Kualitas hidup penduduk di provinsi Banten telah mengalami peningkatan sebagai hasil dari program keluarga berencana (KB). Dengan memiliki perencanaan keluarga, orang-orang dapat mengatur berapa banyak anak yang mereka miliki dan berapa lama mereka akan tinggal bersama mereka, yang memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada perencanaan pendidikan, kesehatan, dan keuangan keluarga, yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan penduduk (Sunaryo & Puspia, 2016).

Secara keseluruhan, program Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Banten telah menunjukkan hasil yang positif dalam menghentikan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran, mengurangi angka kematian ibu dan bayi, dan meningkatkan kualitas hidup. Untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang, dukungan dan keberlanjutan program ini sangat penting.

Dampak Dampak dari bertambahnya jumlah penduduk dapat menurunkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pengangguran, dan meningkatkan kejahatan. Thomas Robert Malthus mengatakan bahwa ada dua jenis pengendalian yang dapat mencegah pertumbuhan penduduk: pengendalian preventif dan pengendalian positif. Manajemen preventif adalah upaya untuk mempengaruhi pertumbuhan penduduk dengan mengurangi angka kelahiran. Menghindari perkawinan, menunda usia perkawinan, dan membatasi jumlah anak (keluarga berencana). Salah satu upaya untuk mengekang pertumbuhan penduduk adalah amanat BKKBN. Program BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) tidak hanya bertujuan untuk mengekang pertumbuhan penduduk,

namun meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender juga menjadi salah satu tujuan dari program BKKBN. Program Keluarga Berencana memungkinkan pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab berapa banyak anak dan jarak umur (spacing) antar anak yang mereka inginkan, serta memastikan bahwa informasi tersedia dan metode yang aman dan efektif untuk mencapainya. Keberhasilan program keluarga berencana sangat dikaitkan dengan wanita usia subur. Meskipun program KB telah menurunkan populasi, mereka gagal meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan perempuan (Christi & Apriyanti, 2022).

KESIMPULAN

Program Keluarga Berencana (KB) adalah upaya pemerintah Provinsi Banten untuk menghentikan pertumbuhan penduduk. Pemerintah provinsi telah berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program KB melalui penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat, akses yang lebih mudah terhadap alat kontrasepsi, dan peningkatan layanan kesehatan reproduksi. Hasil dari upaya ini menunjukkan penurunan yang signifikan dalam angka kelahiran dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, masih ada masalah yang harus diselesaikan, seperti keterbatasan sumber daya, disparitas tingkat kesadaran wilayah, dan resistensi budaya terhadap program KB. Untuk menjamin keberlanjutan program ini, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan partisipasi aktif masyarakat. Upaya yang berkelanjutan dan konsisten diharapkan memiliki efek positif yang lebih besar dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten.

REFERENSI

- Adim, A. F. (2015). *Biopower ACT: Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Jawa Tengah dalam Prespektif Biopolitics*. 2–5.
- Assyakurrohim, D., Ikram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(1), 2–3.
- Bella, A. (2022). *Kenali Tujuan dan Manfaat Program Keluarga Berencana*. Alodokter. <https://www.alodokter.com/kenali-tujuan-dan-manfaat-program-keluarga-berencana>
- Cessaria, D. E. (2023). *Pelayanan Keluarga Berencana* (Asriati & F. Realita (ed.)). Eureka Media Aksara.
- Christi, A. M., & Apriyanti, Y. (2022). Pengaruh Program Keluarga Berencana dan Perempuan Bekerja Terhadap Pertumbuhan Penduduk di Kalimantan Timur. *Jurnal Manajemen*, Vol 14(2), 304–305.
- Daldukkbpppa, A. (2015). *Makalah Program Keluarga Berencana di Indonesia*. Daldukkbpppa. <https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/makalah-program-keluarga-berencana-di-indonesia-65>
- Falimatuzahroh, Deffinika, I., Soelistijo, D., & Astina, I. K. (2023). Efektivitas Program Keluarga Berencana Terhadap Penurunan Angka Kelahiran (Studi Kasus di Kecamatan Bandar). *Journal of Demography, Ethnography, and Social Transformation*, Vol 3(2), 96.
- Handayani, R. (2014). Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Bagi Stakeholders dan Mitra Kerja di Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 5(1), 82.
- Hartanto, H. (2004). *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Pustaka Sinar Harapan.
- Hendayani, D., & Putra, A. (2022). Evaluasi Program Keluarga Berencana di Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Kebijakan Publik*, Vol 14(1), 89–102.
- Madi, Sulasri, & Imelda. (2023). Dampak Program Keluarga Berencana (KB) Terhadap Eksistensi Lembaga Pendidikan (Studi Kasus pada SD Negeri 41 Buton). *SYATAR*, Vol 3(2), 106.
- Muaya, T. M., Sampe, S., & Neni, K. (2023). Efektivitas Program Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance*, 3(1), 2.
- Ningsih, Y., & Ardila, R. (2020). Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana di Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, Vol 6(2), 123–135.
- Nurdianti, S. R. (2014). Analisis Faktor-Faktor Hambatan Komunikasi dalam Sosialisasi Program Keluarga Berencana pada Masyarakat Kebon Agung-Samarinda. *Journal Ilmu Komunikasi*, Vol 2(2), 152.
- RI, K. K. (2018). *Riset Kesehatan Dasar 2018*. Kemkes.
- Rohayati, S., Agustino, L., & Yulianti, R. (2021). Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka Kota Serang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, Vol 5(2), 125–126.
- Rohim, S. (2016). Argumen Program Keluarga Berencana (KB) dalam Islam. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol 1(2), 149.

- Romadhona, A. (2019). Analisis Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Akseptor Keluarga Berencana Pada Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, Vol 9(1), 2.
- Rosintah. (2023). Dua Tahun Penduduk Banten Bertambah 743 Ribu Jiwa. Radar Banten. <https://www.radarbanten.co.id/2023/11/09/dua-tahun-penduduk-banten-bertambah-743-ribu-jiwa/>
- Sari, A. I., & Priyanto, H. (2019). Efektivitas Sosialisasi Program Keluarga Berencana di Provinsi Banten. *Jurnal Komunikasi dan Penyuluhan*, Vol 15(1), 67–69.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 43–60.
- SD, R. P., Putro, T. S., & Indrawati, T. (2014). Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1(2), 2.
- Soleha, S. (2016). Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam Paser Utama. *Journal Ilmu Pemerintah*, 4(1), 41.
- Statistik, B. P. (2024a). Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Banten (Ribu Jiwa), 2022-2024. BPS Provinsi Banten. <https://banten.bps.go.id/indicator/12/521/1/proyeksi-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>
- Statistik, B. P. (2024b). Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen), 2020-2022. BPS Provinsi Banten. <https://banten.bps.go.id/indicator/12/144/1/laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>
- Sunaryo, & Puspia, K. (2016). Kinerja Poskesdes dalam Pelaksanaan Program KB di Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Vol 3(2), 171.
- Zakaria, D. A., & Meidawati, M. (2019). Rancangan Bangunan Sistem Informasi Pendataan Akseptor Program Keluarga Berencana (KB) DPPKBP3A Kota Tasikmalaya. *Jurnal Manajemen dan Teknik Informatika*, Vol 3(1), 242.